

Analisis Keterkaitan Pengakuan Pendapatan Dalam *Accrual Method* Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan PT. Prima Tata Kargo Palembang

Ike Krisnawati¹, Emma Lilianti², Jusmani³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Ikek96@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a developing country where business people support the country's economy. Business people make a significant contribution to the country by paying taxes. Value Added Tax, also known as VAT, is a tax charged on the sale and purchase of goods and services provided by corporate taxpayers or individual taxpayers who have met the requirements as Taxable Entrepreneurs (PKP). The accrual revenue recognition method (also known as the "Accrual Method") is an accounting method in which revenues and expenses are recognized or recorded when transactions occur rather than when money is received. This is one of the company's accounting policies. Research at PT. Prima Tata Kargo Palembang was motivated by the desire to learn how financial reports are recorded and whether they are based on recognized SAK. PT Prima Tata Kargo Palembang is a company that as a taxpayer has met the Subject and Object requirements of Value Added Tax (VAT) which has been operating in Indonesia for quite a long time with its activities as a company in the field of container loading/unloading services. The purpose of this research is to determine the recognition of income using the accrual method in reporting Value Added Tax at the company PT. Prima Tata Kargo Palembang. The research methodology used in this research is a descriptive method, namely a problem-solving approach that focuses on describing the condition of the subject/object in the research. The research results show that the relationship between value added tax reporting and income at PT. Prima Tata Kargo uses the accrual method, where income is recognized when the transaction occurs so that income is recognized according to the actual situation and the recognition, payment and tax reporting are appropriate for that period. The higher the income recognized from providing services, the higher the value added tax payable and reported by PT. Prima Cargo Management. Calculating value added tax at PT. Prima Tata Kargo is based on the basic tax rate of 11% of the tax base. PT. Prima Tata Kargo has fulfilled its obligations to collect, pay and report tax obligations related to VAT.

Keywords: Income Recognition, Accrual Method, Value Added Tax (VAT), Business, Taxable Entrepreneurs.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang dimana para pelaku bisnis mendukung perekonomian negara. Para pelaku bisnis memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara dengan membayar pajak. Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenal sebagai PPN merupakan pajak yang dibebankan pada penjualan dan pembelian barang dan jasa yang disediakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode pengakuan pendapatan akrual (juga dikenal sebagai "Metode Akrual") adalah metode akuntansi dimana pendapatan dan beban diakui atau dicatat pada saat transaksi terjadi daripada saat uang diterima. PT Prima Tata Kargo Palembang merupakan perusahaan adalah wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objektif terkait perpajakan yang lama berada di Indonesia dalam di bidang jasa bongkar/muat container. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengakuan pendapatan dalam *accrual method* dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan PT. Prima Tata Kargo Palembang. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, yaitu suatu pendekatan pemecahan masalah yang menitikberatkan pada penggambaran keadaan subyek / obyek dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pelaporan pajak



pertambahan nilai dengan pendapatan pada PT. Prima Tata Kargo menggunakan metode akrual, pendapatan diakui saat transaksi terjadi sehingga pendapatan diakui sesuai dengan keadaan sebenarnya serta pengakuan, pembayaran, dan pelaporan perpajakannya telah sesuai untuk periode tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diakui dari pemberian jasa, maka semakin tinggi pula pajak pertambahan nilai yang terutang dan dilaporkan oleh PT. Prima Tata Kargo. Menghitung pajak pertambahan nilai pada PT. Prima Tata Kargo berdasarkan ketentuan tarif dasar pajak sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. PT. Prima Tata Kargo telah memenuhi kewajiban memungut, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak terkait PPN.

Kata kunci: Pengakuan Pendapatan, Metode Akrual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bisnis, Pengusaha Kena Pajak (PKP).

A. PENDAHULUAN

Pajak mendanai pengeluaran publik. Sesuai aturan yang berlaku, masyarakat membayar pajak kepada negara. Karena pentingnya fungsi perpajakan, maka setiap orang wajib untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa peran pajak, sebagian besar fungsi pemerintah akan sulit dijalankan. Indonesia adalah negara berkembang dimana para pelaku bisnis mendukung perekonomian negara. Melalui hasil yang mereka hasilkan, para pelaku usaha tersebut memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara dengan membayar pajak. Setiap perusahaan memiliki kebijakan akuntansi dan pajak khusus yang diikutinya saat menjalankan bisnis; dalam hal ini, kebijakan tersebut digunakan untuk perencanaan pajak yang menguntungkan pendapatan perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenal sebagai PPN, PPN merupakan pajak yang dibebankan pada penjualan dan pembelian barang dan jasa yang disediakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya harus ditanggung oleh pembeli karena PPN adalah pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun ada kewajiban untuk mengumpulkan dan menyetor.

Metode pengakuan pendapatan akrual (juga dikenal sebagai "Metode Akrual") adalah metode akuntansi dimana pendapatan dan beban diakui atau dicatat pada saat transaksi terjadi daripada saat uang diterima. Ini adalah salah satu kebijakan akuntansi perusahaan. Ada berbagai jenis kebijakan akuntansi. Untuk pembayaran yang dilakukan atau transaksi yang diterima. Praktek pendokumentasian transaksi akuntansi pada saat transaksi didokumentasikan pada saat uang diterima atau pada saat pengembalian diberikan dikenal dengan istilah pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode kas (Cash Basis). Akuntansi berbasis kas mencatat pendapatan segera setelah diterima dan pengeluaran segera setelah dicairkan. Pajak timbul saat aktivitas penjualan baik pada saat diterima ataupun diserahkannya barang dan jasa tersebut.

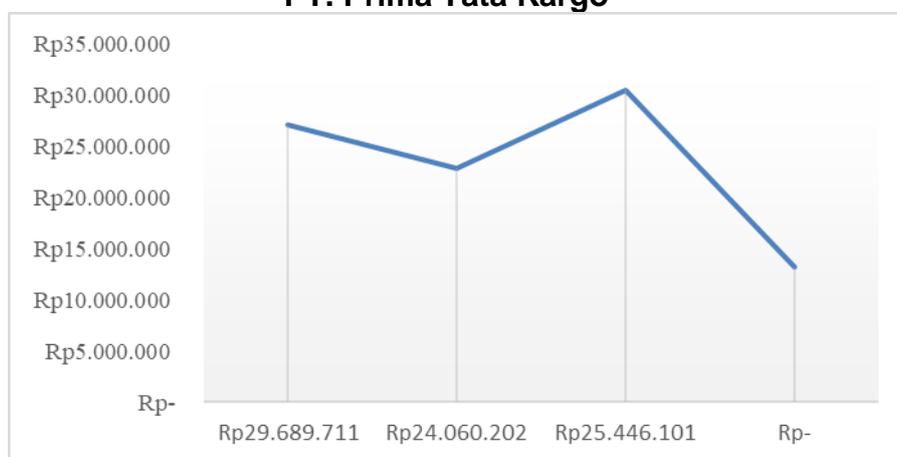
PPN dilaksanakan berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, yang meliputi UU RI Nomor 11 Tahun 1994 dan perubahannya, UU RI Nomor 18 Tahun 2000, dan UU RI Nomor 42 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang mewah. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP) yang dipungut dengan tarif 11% diberlakukan untuk konsumsi dalam negeri. PPN adalah pajak atas tambahan nilai tambah atas barang dan jasa diproduksi atau ditawarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Salah satu pajak tersebut dikategorikan sebagai PPN yaitu pajak tidak langsung. Penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan penanggung pajak adalah tiga komponen pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan terletak secara

terpisah. Implikasi hukum dari fitur ini adalah pihak-pihak yang terpisah bertanggung jawab dalam memikul beban pajak dan membayar pajak ke kas negara. Sedangkan pertanggung jawaban pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak sebagai penjual Barang Kena Pajak atau penyedia Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung beban pajak ini benar-benar bertempat sebagai konsumen Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Akibatnya, jika terjadi kesalahan pada pemungutan PPN.

Daftar pendapatan PT. Prima Tata Kargo selama empat bulan digunakan untuk investigasi ini karena pelaku usaha yang merupakan wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai Subjek dan Objek PPN dan sudah lama melakukan kegiatan usaha di Indonesia dalam kegiatannya sebagai penyedia pemuatan peti kemas / layanan bongkar muat. PT. Prima Tata Kargo Grafik di bawah ini menunjukkan dari Januari hingga April 2023.

**Grafik Data Pendapatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT. Prima Tata Kargo**



Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023

Tabel Data Pendapatan PT. Tata Prima Kargo

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 27,013,867
2	Februari	Rp. 22,760,824
3	Maret	Rp. 30,379,432
4	April	Rp. 13,180,280
Total		Rp. 93,334,403

Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023

PT. Prima Tata Kargo dalam Pengakuan pendapatan dicatat dalam catatan akuntansi dengan menggunakan kebijakan akrual, dan pelaporan bulanan pajak pertambahan nilai juga dicatat. Berikut informasi mengenai PPN, PT. Prima Tata Kargo periode Januari s/d April 2023.

**Tabel Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT. Prima Tata Kargo 2023**

No	Bulan	Pendapatan
1.	January	Rp. 29,689,711
2	February	Rp. 24,060,202
3	March	Rp. 25,446,101
4	April	-
Total		Rp. 79,196,014

Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023

Data dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk meramalkan situasi masa depan perusahaan, memantau operasi bisnis saat ini, dan menilai tindakan yang dipilih perusahaan. Pelaporan keuangan dibuat dengan menggunakan SAK pada prinsip umum akuntansi, agar pembaca laporan dapat memahami laporan keuangan dengan benar. Melacak laporan keuangan yang dihasilkan oleh Perusahaan Terbuka Prima Tata Kargo saat terjadi transaksi, bukan ketika uang ditukar atau diterima, dicatat dengan metode akrual atau pencatatan langsung yang dikenal dengan metode akrual. Karena akrual melibatkan aset dan liabilitas, keduanya akan berdampak pada nilai neraca.

Penelitian pada PT. Prima Tata Kargo dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempelajari bagaimana laporan keuangan dicatat dan apakah sudah berdasarkan atas SAK yang diakui. Peneliti tertarik untuk menulis terkait tentang “Analisis Hubungan Pengakuan Pendapatan Pada Metode Akrual Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Prima Tata Kargo Palembang” berdasarkan konteks permasalahan tersebut diatas.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 Ayat 7 (2015), pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari operasi perusahaan selama kurun waktu tertentu apabila arus masuk meningkatkan ekuitas tanpa berasal dari input investasi.

SAK ETAP, berdasarkan IAI (2019:22), mendefinisikan pendapatan sebagai pendapatan yang dihasilkan pada pelaksanaan aktivitas entitas secara teratur dan dikenal sebagai penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan nama sewa diantara nama lainnya. Pendapatan didefinisikan sebagai “bertambahnya aktiva dan berkurangnya kewajiban usaha yang dihasilkan dari kegiatan pembelian barang atau jasa untuk khalayak umum / pelanggan khususnya”, menurut Harnanto (2019:102).

Menurut Sochib (2018:47), pemasukan merupakan arus masuk uang yang dihasilkan dari unit bisnis yang menawarkan produk atau layanan untuk waktu tertentu. Penghasilan dari kegiatan bisnis inti bisa menaikkan nilai kekayaan perusahaan sehingga yang akan menyebabkan modal meningkat.

Pengakuan Pendapatan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan dapat ditentukan. Tujuan penggunaan standar ini adalah untuk memberikan informasi akuntansi yang akurat dan terkini. Pendapatan perusahaan

untuk waktu tertentu dapat diakui sebelum atau sesudah penjualan, sesuai dengan standar akuntansi.

Selain itu, penjelasan Greuning et al. (2013) pada halaman 290 menyatakan bahwa penjualan tidak bisa dicatat saat biaya menyertainya tidak bisa dievaluasi secara akurat. Sampai pendapatan dapat dicatat, pembayaran yang sebelumnya diterima untuk penjualan harus ditunda sebagai kewajiban. Berikut adalah bagaimana pendapatan jasa diakui:

- a. Pendapatan diakui menurut tahap penyelesaian pada tanggal pelaporan saat hasil transaksi bisa diharapkan secara wajar.
- b. Jumlah pendapatan yang dicatat akan bergantung pada biaya kontrak yang dapat diperbarui ketika hasil transaksi tidak dapat diprediksi secara akurat.

Menurut Greuning dan rekan (2013:300), "Penghasilan kontrak yaitu terdiri dari total kontrak yang disepakati pada awalnya, serta pembayaran untuk perubahan, klaim, dan insentif sejauh diharapkan pembelian yang dihasilkan dari penjualan dan dapat diukur secara akurat. 2 cara untuk mencatat pemasukan untuk kontrak bangunan (Kholifah, 2013:62):

- a. Pendapatan kontrak konstruksi diakui dengan menggunakan Metode Kontrak Selesai ketika seluruh pekerjaan telah habis.
- b. Metode Persentase Penyelesaian mendasarkan pengakuan pemasukan kontrak konstruksi saat persentase penyelesaian pada waktu periode pekerjaan.

Menurut Martani, dkk. (2016: 208–209), mengakui penghasilan saat besar kemungkinan perusahaan akan menerima manfaat ekonomi dan nilai manfaat tersebut dapat diestimasi secara akurat. Meskipun pendapatan sering diakui ketika barang dan jasa diberikan, penghasilan juga dapat diklaim lebih awal atau lebih lambat, seperti sebelum penyerahan produk atau jasa. Dalam kontrak pembangunan gedung, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan merupakan hal yang biasa.

Kemudian Martani, dkk. (2016: 222) menambahkan penjelasan berikut : Pemasukan kontrak dapat diakui dengan berfokus pada apakah hasil kontrak bangunan dapat diramalkan dengan akurasi yang wajar.

Jumlah penghasilan juga keuntungan yang diakui untuk setiap periode ditentukan dengan mengurangkan seluruh jumlah penghasilan beserta keuntungan yang diakui sampai dengan periode sebelumnya dengan menggunakan metode di bawah ini:

$$\begin{array}{rcl} \text{Penghasilan} & = & \text{Akumulasi pendapatan} & - & \text{Estimasi seluruh} \\ \text{Berjalan} & & \text{(atau keuntungan)} & & \text{penghasilan} \\ & & & & \text{(atau keuntungan)} \end{array}$$

Pengukuran Pendapatan

Ini membutuhkan dasar pengukuran yang sesuai untuk menyatakan secara adil tingkat penjualan dan laba perusahaan. Namun, memutuskan yayasan untuk menilai pendapatan akan memberikan tantangan. Menurut PSAK No. 23 Paragraf 10 (2015) tentang akuntansi pendapatan, entitas serta pemakai kekayaan pada umumnya menyepakati berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan dari transaksi. Jumlah ini dihitung sebagai nilai sesuai dengan yang diterima, dikurangi diskon bisnis dan rabat volume yang disetujui perusahaan.

Jumlah penghasilan dalam PSAK No. 23 paragraf 11 (2015) sama dengan total uang yang diterima, dan remunerasi biasanya dibayarkan dalam bentuk kas atau setara kas. Namun, nilai wajar pembayaran mungkin kurang dari jumlah nominal uang yang diterima atau piutang ketika arus masuk uang atau setara kas tertunda.

Indikator Pendapatan

Menurut Tuanakotta (2011:35) Pendapatan adalah jumlah uang yang dihasilkan Perusahaan dengan memproduksi barang atau jasa selama periode waktu tertentu.

$\text{Pendapatan} = \text{Jumlah uang yang dihasilkan perusahaan}$

Sumber : Tuanakotta (2011:35)

Definisi Pajak Pertambahan Nilai

PPN menurut Pohan (2016:22) adalah pajak yang dibebankan oleh produsen atas setiap nilai tambah barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. PPN atau Pajak Barang dan Jasa (GST) adalah nama Pajak Pertambahan Nilai dalam Bahasa Inggris. PPN adalah contoh pajak tidak langsung, artinya dibayar oleh orang bukan kena pajak (pedagang), yaitu wajib pajak (konsumen) tidak langsung membayar. Pajak yang dibayar olehnya.

Dasar Hukum PPN

UU no. 18 Tahun 2000, yang kembali merevisi UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diundangkan setelah perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 berisi tentang aturan pelaksanaan akhir.

Subyek dan Obyek PPN

Subyek PPN

Resmi (2011:5), PPN adalah pajak tidak langsung yaitu pajak yang diakhir bisa dipungut dan dialihkan oleh orang lain atau pihak ketiga. Pihak yang mempunyai bertanggung jawab untuk memungut, mengajukan, dan melaporkan PPN adalah:

1. PKP yang melakukan pengembalian Barang Kena Pajak dalam daerah Pabean dan mengekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
2. Perusahaan kecil yang memutuskan menjadi PKP.

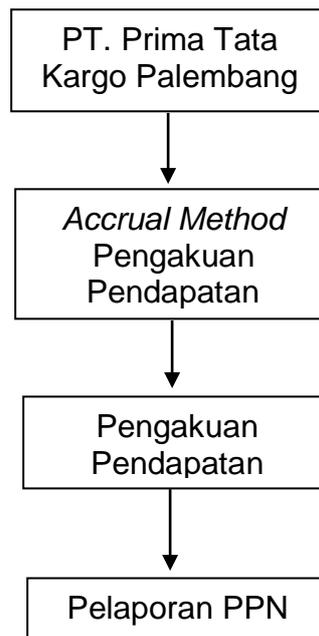
Komponen PPN

Ketika UU baru mulai berlaku, subjek pajak pertambahan nilai selalu berubah 42/2009, yang mulai berlaku 1 April 2010.

Nilai

- 1) Tarif PPN sebesar 11%.
- 2) Tarif PPnBM paling rendah 11 persen dan setinggi-tingginya persen.
- 3) Tarif PPN untuk PDB ekspor adalah 0% (nol persen).

Kerangka Berpikir



Gambar Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi

PT. Prima Tata Kargo, yang berbasis di Palembang, adalah perusahaan pengurusan bongkar muat yang menangani barang lokal dan internasional (impor dan ekspor). PT. Prima Tata Kargo berdiri sejak tahun 2012 dan berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada rekanan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi seperti pengiriman barang, PT. Prima Tata Kargo berusaha untuk meningkatkan kemampuan pelayanannya.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, yaitu suatu pendekatan pemecahan masalah yang menitikberatkan pada penggambaran keadaan subyek / obyek dalam penelitian, bisa orang, lembaga, masyarakat, atau hal-hal lain yang saat ini ada berdasarkan fakta nyata atau apa adanya.

Peneliti membutuhkan pendekatan analitik untuk dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan cara pengakuan pendapatan pada metode akrual yang digunakan oleh PT. Prima Tata Cargo Palembang dan mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan uraian di atas.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
1.	Pengakuan Pendapatan dalam Accrual Method	Pengakuan pendapatan adalah pendekatan <i>accrual method</i> merupakan pendapatan, dimana	Pendapatan = Jumlah uang yang dihasilkan perusahaan

Halim: 2017)	diakui pada saat transaksi terjadi, meskipun kas atau pembayaran kas belum dilakukan.	(<i>Tuanakotta, 2011 p.35</i>)
2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ahmad Halim: 2017)	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan.	PPN yang tertuang = tarif x DPP (<i>UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010</i>)

Populasi

Menurut Rianan(2012:148) "Populasi yaitu suatu generalisasi yang terdiri dari: objek dengan dimensi juga sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diperiksa dan ditarik hasil" (hal.148). Populasi adalah domain aplikasi luas, termasuk objek/subjek yang menunjukkan atribut serta fitur dilakukan peneliti untuk diperiksa dan dilakukan penilaian (Sugiyono, 2018:117).

Sampel

Riana (2012:149) "Sampel adalah komponen dari seluruh populasi sample adalah bagian dari populasi dan hanya mencerminkan keseluruhan secara longgar dengan kata lain harus representatif.

Pengukuran sampel adalah tindakan yang menentukan seberapa besar atau kecil sampel yang diambil selama penelitian (Sugiyono, 2018:118). Data pada pendapatan dan pajak pertambahan nilai PT. Prima Tata Kargo Palembang selama empat tahun antara tahun 2019 dan 2022 dijadikan sebagai sampel penelitian.

Sumber Data

Indrianto dan Supomo (2013:143) mendefinisikan data sekunder, yang didefinisikan sebagai "sumber data penelitian yang penelitian peroleh secara tidak langsung melalui media". Data sekunder dari Umar (2013:42) "Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pengumpul dan pihak lain dan disajikan sebagai tabel atau grafik. "Bagian keuangan dan akuntansi pada PT. Prima Tata Kargo menyediakan data laporan keuangan untuk penelitian ini, beserta buku-buku perpustakaan dan data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Untuk fakta dan informasi diperlukan sebagai landasan analisis baik objektif dan akurat dari literatur maupun penelitian itu sendiri, peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan di lapangan.

2) Dokumentasi

Dalam pendokumentasian, dicari informasi tentang topik catatan, transkrip, buku, agenda, dan informasi hasil pendapatan selama 4 tahun periode.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:29), Penelitian deskriptif menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang belum diproses tanpa analisis lebih lanjut atau generalisasi. Istilah "data" dalam penelitian ini mengacu pada analisis deskriptif dan dalam penelitian ini mengacu pada data numerik berfungsi semata-mata untuk menyusun, meringkas, dan menampilkan data secara lebih mencerahkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Akuntansi Pada PT. Prima Tata Kargo

Kebijakan akuntansi merujuk pada keputusan manajemen dalam menentukan aturan, standar, praktik, dan prosedur yang digunakan dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Beberapa jenis standar akuntansi bisa diterapkan pada satu subjek yang sama. Pertimbangan dan pilihan harus sesuai dengan situasi perusahaan. Sasaran yang paling sesuai dengan kebijakan akan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan dengan akurat. Di bawah ini merupakan kebijakan yang ada pada PT. Prima Tata Kargo, sebagai berikut :

1. Menentukan Persentase;
2. Berorganisasi sebelum menandatangani kontrak;
3. Membayar tagihan tepat waktu;
4. Mengurangi resiko utang;
5. Merencanakan pengembangan bisnis;
6. Membuat pembukuan keuangan penting dalam mengelola keuangan;
7. Buat evaluasi tahunan;
8. Mengutamakan kebutuhan perusahaan.

Sistem Akuntansi Pada PT. Prima Tata Kargo

PT. Prima Tata Kargo menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, dengan metode pencatatan akuntansi yang didasarkan pada konsep pengakuan yang sebenarnya. PT. Prima Tata Kargo mengakui jika perusahaan menerima pendapatan saat awal transaksi, tetapi bukan saat kas diterima. PT. Prima Tata Kargo mencatat pendapatan saat transaksi sebenarnya selesai, walaupun perusahaan yang bertransaksi belum menerima uang secara tunai atas transaksi tersebut. Itu juga berlaku untuk pencatatan beban perusahaan. Tabel di bawah ini menunjukkan contoh transaksi yang dilakukan PT Prima Tata Kargo dengan metode akrual pada bulan Januari dan Maret 2023

Tabel Laporan Keuangan PT. Prima Tata Kargo Bulan Januari 2023

				PT. PRIMA TATA KARGO			
				DAILY - PETTY CASH REPORT			
				PERIOD FROM : 01 JANUARI 2023 UP TO 31 JANUARI 2023			
PV.NO	DATE	PENERIMA	NAMA TRANSAKSI	DEBET	CREDIT	SALDO	
PENERIMAAN SALDO							
PV-0000	02/01/23		Saldo Bulan Lalu	52.095.955		52.095.955	
		Pak Ahmad	Dibayarkan Oleh Pak Ahmad	33.749.547		85.845.502	
PV-0000	04/01/23	Ike KW	Uang Tagihan PT.Lingga Djaja (No.479 dan 511)	8.775.144		94.620.646	
PV-0000	04/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	25.000.000		119.620.646	
PV-0000	11/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	70.000.000		189.620.646	
PV-0000	16/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	50.000.000		239.620.646	
PV-0000	18/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	100.000.000		339.620.646	
PV-0000	25/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	150.000.000		489.620.646	
PV-0000	26/01/23	Junaidy	Angsuran Kasbon ke -2	250.000		489.870.646	
PV-0000	26/01/23	Wak Leh	Angsuran Kasbon ke -3	250.000		490.120.646	
PV-0000	26/01/23	Eko F	Angsuran Kasbon ke-5	250.000		490.370.646	
PV-0000	26/01/23	Edi	Angsuran Kasbon ke-5	250.000		490.620.646	
PV-0000	26/01/23	Sarmin	Angsuran Kasbon ke-1	500.000		491.120.646	
PV-0000	26/01/23	Ike KW	Tagihan Hok Tong MV.PAC Shaula V.506X	23.718.000		514.838.646	
PV-0000	30/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	50.000.000		564.838.646	
PV-0000	31/01/23	Ike KW	Penerimaan Kas	50.000.000		614.838.646	

Sumber : PT. Prima Tata Kargo

Tabel Laporan Keuangan PT. Prima Tata Kargo Bulan Maret 2023

 PT. PRIMA TATA KARGO DAILY - PETTY CASH REPORT PERIOD FROM : 01 MARET 2023 UP TO 31 MARET 2023						
PV.NO	DATE	PENERIMA	NAMA TRANSAKSI	DEBET	CREDIT	SALDO
PENERIMAAN SALDO						
PV-0000	01/03/23		Saldo Bulan Lahu	22.760.824		22.760.824
		Pak Ahmad	Dibayarkan Oleh Pak Ahmad	8.348.344		31.109.168
PV-0000	02/03/23	Ike KW	Penerimaan Kas	40.000.000		71.109.168
PV-0000	08/03/23	Nia Meliyanti	Penerimaan Kas	49.950.000		121.059.168
PV-0000	08/03/23	Eko F	Biaya pengembalian ops kerja kapal MV.Schelde Confidence V.6073X	680.000		121.739.168
PV-0000	09/03/23	Ike KW	Penerimaan Kas (75.000.000) kirim kerumah 25.000.000	50.000.000		171.739.168
PV-0000	16/03/23	Ike KW	Penerimaan Kas	50.000.000		221.739.168
PV-0000	20/03/23	Ike KW	Biaya terima tagihan MV.Schelde Confidence V.6073X (Hok Tong)	6.551.000		228.290.168
PV-0000	21/03/23	Nia Meliyanti	Penerimaan Kas	55.000.000		283.290.168
PV-0000	27/03/23	Nia Meliyanti	Penerimaan Kas	150.000.000		433.290.168
PV-0000	27/03/23	Wak Leh	Angsuran Kasbon ke-5	250.000		433.540.168
PV-0000	27/03/23	Pak Edi	Angsursn Kasbon ke-7	250.000		433.790.168
PV-0000	27/03/23	Pak Sarmin	Angsuran Kasbon ke-5	500.000		434.290.168

Sumber : PT. Prima Tata Kargo

Pembahasan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PPN diakui berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Untuk adanya PPN didasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A. PT. Prima Tata Kargo telah cukup syarat sebagai Perusahaan Kena Pajak yang mana PT. Prima Tata Kargo berkewajiban untuk memungut pajak yang terhutang, PPN yang di bayar sebagai pajak dan ada pajak masukan bisa dikreditkan dan setorkan pajak penjualan atas jasa yang terhutang, memiliki kewajiban melaporkan pajak.

PT. Prima Tata Kargo menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mana sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dan Pasal 8, sebagai berikut :

1. Tarif PPN yang di terapkan di atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak Berwujud;
 - b. Ekspor Jasa Kena Pajak.
2. Tarif PPN pada umum nya serendah rendah nya 11 % dan paling tinggi 200%.

Dibawah ini merupakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Prima Tata Kargo, yaitu :

1. Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran sebagai berikut : (DPP (dasar pengenaan pajak) X 11%.

Contoh Pajak Pertambahan Nilai Keluaran :

PT. Prima Tata Kargo memberi jasa kepada PT. A nilainya Rp. 150.000.000 dengan cara kredit atau dengan kesepakatan perjanjian yang dilakukan satu bulan setelah transaksi. Transaksi di ketahui DPP-nya sebesar Rp. 150.000.000 berasal dari jasa yang diberikan pada PT. A dan PPN nya sebesar Rp. 150.000.000 x 11 % yaitu sebesar Rp. 16.500.000. penjualan akan di diskon tunai sesuai kebijakan perusahaan. Dan jurnal nya adalah sebagai berikut :

Piutang	166.500.000
PPN keluaran	16.500.000
Pendapatan jasa	150.000.000

Contoh PPN masukan :

PT. Prima Tata Kargo melakukan jasa bongkar muat barang kepada PT. B yang terdaftar sebagai PKP dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000. Dari nilai yang atas diketahui DPP nya sebesar Rp. 25.000.000 jasa yang di berikan PT. A dan PPN nya sebesar Rp. 25.000.000 dikalikan 11% yaitu sebesar Rp. 2.750.000. Jurnal adalah sebagai berikut :

Beban pemeliharaan peralatan	25.000.000
PPN masukan	2.750.000
Hutang	27.750.000

2. Perhitungan pajak yang di bayar

Pajak yang dibayar yaitu selisih dengan pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat menjual jasa PT. Prima Tata Kargo memungut PPN atas konsumen dan disetor ke negara dan saat membeli barang atau jasa PT. Prima Tata Kargo mendapatkan pajak masukan yang sudah di bayar maka dari itu pajak yang sudah dibayar itu pakai untuk pengurang pajak yang disetor kenegara. Misalkan transaksi pajak yang dibayarkan sebesar $16.500.000 - 2.750.000 = 13.750.000$

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Semua lampiran SPT yang dibuat sesuai dengan tata cara yang berlaku harus dilampirkan ke laporan SPT Masa PPN bulanan 1111 dalam format elektronik. Untuk PKP Pedagang Eceran atau PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang diatur oleh peraturan perpajakan, daftar pajak keluaran harus dilaporkan pada Formulir 1111 B3 bersama Faktur Pajak untuk SPT Masa PPN 1111 pada masa pajak yang sama dengan tanggal eFaktur dibuat. Pajak Masukan, yang dapat dikreditkan tetapi tidak dilakukan pengkreditan PPN Masukan, harus dilaporkan pada Formulir 1111 A2. Saat seluruh persyaratan dipenuhi.

PT. Prima Tata Kargo menghasilkan PPN dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa bulanan disetor dan dilaporkan paling lambat 30 hari setelah tanggal pajak berakhir; contohnya, pajak bulan Mei harus dilaporkan paling lambat tanggal 30 juni. Langkah-langkah untuk membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Merekam semua data keluaran PPN.

2. Merekam semua data Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di antara data yang dicatat adalah sebagai berikut:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama perusahaan dari perusahaan yang bertransaksi dengan PT. Prima Tata Kargo;
- Nomor faktur/nomor seri adalah nomor yang tercantum pada faktur saat PT. Prima Tata Kargo membeli barang atau jasa. Nomor ini diperoleh dari perusahaan yang bertransaksi dengan PT. Prima Tata Kargo. Kode pajak yang digunakan sebagai jenis transaksi ditampilkan pada dua digit di depan nomor faktur. Sebagai contoh, kode faktur pajak 01 menunjukkan bahwa PT. Prima Tata Kargo harus membayar Pajak Pertambahan Nilai. Kode faktur pajak 02 dan 03 menunjukkan bahwa pemungut harus membayar Pajak Pertambahan Nilai.
- Tanggal transaksi adalah tanggal yang tercantum di faktur saat PT. Prima Tata Kargo membeli barang atau jasa.

- d. DPP dan PPN adalah data yang diperoleh dari faktur saat PT. Prima Tata Kargo membeli barang atau jasa tersebut.
3. Membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Untuk mengisi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Anda harus menginstal program E-Faktur Masa PPN dan mengakses DJP Online di komputer Anda. Berikutnya, Anda harus mengisi data perusahaan, yaitu NPWP, nama perusahaan, alamat, dan nama direktur, di E-Faktur.

Tabel Pajak Keluaran PT.Prima Tata Kargo

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA/NPWP : PT PRIMA TATA KARGO		MASA : 02		2023 (mm-mm-yyyy)				
NPWP : 031684848		301 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453668	06-02-2023	3.727.399,00	410.013,00	0,00	
2	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453669	06-02-2023	2.664.338,00	293.077,00	0,00	
3	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453700	06-02-2023	2.664.338,00	293.077,00	0,00	
4	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453706	06-02-2023	1.863.699,00	205.006,00	0,00	
10	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453707	06-02-2023	11.986.657,00	1.318.532,00	0,00	
11	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453708	06-02-2023	14.654.816,00	1.612.029,00	0,00	
12	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453709	08-02-2023	6.652.251,00	731.747,00	0,00	
13	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453710	08-02-2023	13.304.502,00	1.463.495,00	0,00	
14	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453711	08-02-2023	7.327.599,00	806.035,00	0,00	
15	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453712	08-02-2023	2.132.998,00	234.629,00	0,00	
21	PT.GADJAH RUKU	011358470308000	010.004-23.01453718	08-02-2023	6.742.892,00	741.718,00	0,00	
22	PT.ANEKA BUMI PRATAMA	014514699052000	010.004-23.01453719	08-02-2023	2.064.068,00	227.047,00	0,00	
23	PT.PINAGO UTAMA TEK	011172251046000	010.004-23.01453720	08-02-2023	1.993.966,00	219.335,00	0,00	
24	PT.PERKEBUNAN	010611283051000	010.004-23.01453721	08-02-2023	1.332.169,00	146.538,00	0,00	
27	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453724	08-02-2023	1.993.966,00	219.335,00	0,00	
28	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453725	08-02-2023	1.331.214,00	146.433,00	0,00	
29	PT.FAUHAN LOGISTIC	017804295308000	010.004-23.01453726	08-02-2023	5.319.127,00	585.103,00	0,00	
30	PT.LINGGA DJAJA	011297918308000	010.004-23.01453727	08-02-2023	1.993.966,00	219.335,00	0,00	
31	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453728	11-02-2023	5.317.217,00	584.893,00	0,00	
32	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453729	11-02-2023	20.049.273,00	2.204.760,00	0,00	
33	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453730	11-02-2023	2.396.185,00	263.580,00	0,00	
34	PT.HOK TONG	010001527052000	010.004-23.01453731	11-02-2023	7.725.244,00	849.776,00	0,00	
35	PT.PANCA SAMUDERA	011358520308000	010.004-23.01453732	11-02-2023	6.813.551,00	749.491,00	0,00	
36	PT.BINTANG GASING PERSADA	022803886314000	010.004-23.01453733	11-02-2023	8.640.478,00	950.452,00	0,00	
37	PT.ANEKA BUMI PRATAMA	014514699052000	010.004-23.01453734	11-02-2023	2.064.068,00	227.047,00	0,00	

Keterkaitan Pengakuan Pendapatan Terhadap Pelaporan PPN

Pelaporan PPN mencantumkan total pendapatan selama satu masa pajak, di mana pendapatan yang diakui secara langsung oleh perusahaan dicatat dan dilaporkan secara bulanan ke kantor pajak melalui DJP Online yang sudah di terapkan perpajakan. Pengakuan pendapatan terkait langsung dengan pelaporan pajak yang sebenarnya. Pendaptan akrual adalah menunjukkan pendapatan yang diakui dan Untuk di laporkan PT. Prima Tata Kargo, pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau Invoice Penjualan untuk transaksi tersebut.

Tabel SPT PPN PT. Prima Tata Kargo

KEMENTERIAN KEUANGAN RI REPUBLIK INDONESIA		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
MASA PAJAK : PRIMA TATA KARGO		NPWP : 031684848		301 . 000	
ALAMAT : PERUMAHAN VILLA TANJUNG HARAPAN - KOTA		MASA : 01 s.d 01 -2023		Halaman 1 s.d 12	
TELEFON : 0811784539		HP : 085273344722		KLU : S2240	
		Pembayaran (Rp) (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPh/BM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tarif Pajak PPN					
1. Dasar					
1. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri		Rp. 269.906.613,00		Rp. 29.689.711,00	
2. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
3. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (J.A.1 + J.A.2 + J.A.3 + J.A.4 + J.A.5)		Rp. 269.906.613,00		Rp. 29.689.711,00	
B. Tidak Tarif Pajak PPN					
C. Jumlah Seluruh Pengeluaran (J.A. + I.D)					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
		Rp. 269.906.613,00		Rp. 29.689.711,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)					
		Rp. 29.689.711,00		Rp. 29.689.711,00	
B. PPN dealer dimuka dalam Masa Pajak yang sama					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggung					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (E.A. - E.B - E.C)					
		Rp. 29.689.711,00		Rp. 29.689.711,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (E.D - E.E)					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 09/02/23 0:00					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
H. PPN lebih bayar pada:					
1.1 <input type="checkbox"/> Data I.D (Disi dalam hal SPT bukan Pemberitahuan) 1.2 <input type="checkbox"/> Dulu S.D atau <input type="checkbox"/> Dulu S.F (Disi dalam hal SPT Pemberitahuan)					
Dulu : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
dimaksud untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Klasifikasi Restitusi untuk PKP :					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUPP dibuktikan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUPP dibuktikan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dibuktikan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00					
B. PPN Terutang : Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal : (mm-yyyy) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal : (mm-yyyy) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPhBM dealer dimuka dalam Masa Pajak yang sama					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)					
		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (mm-yyyy) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A0 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 40 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPh/BM lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar					
PALEMBANG 10-02-2023 (dd-mm-yyyy)					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAWHA APA YANG TELAH SAYA BERTANDAHI DI ATAS, BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADILAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYRAT.					
<input checked="" type="checkbox"/> PKP Tanda tangan : HERU SUPRAYITNO					
<input type="checkbox"/> Kassa Jabatan : DIREKTUR UTAMA					
Cap Perusahaan :					

Sumber PT.Prima Tata Kargo

Jumlah Pajak Keluaran Bulan Februari 2023 sebesar Rp. 24.060.202 yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sendiri. Jumlah Pajak Masukan PT. Prima Tata Kargo Rp. 0 , jadi total Pajak Keluaran sebesar Rp. 24.060.202 dikurangi dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0, total PPN kurang bayar/lebih bayar pada bulan Februari 2023 sebesar Rp. 24.060.202.

Penerapan Akuntansi PPN PT. Prima Tata Kargo

Adapun penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Prima Tata Kargo Palembang adalah sebagai berikut :

- Membuat faktur pajak untuk setiap kali Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dikirim, diterima, atau dibayar pada tanggal akhir.
- Mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagaimana ketentuannya dalam faktur pajak.

- c. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 11% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak itu sendiri diperoleh dari harga penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- d. Sebelum pelaporan SPT Masa PPN, menyetor pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara selambat-selambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.
- e. Menyampaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan SPT Masa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir Masa Pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Prima Tata Kargo atas laporan pengakuan pendapatan dan pajak pertambahan nilai, dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan pada PT. Prima Tata Kargo dengan menggunakan metode akrual. Metode ini digunakan untuk pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi meskipun pembayarannya tidak diterima dalam bentuk tunai.
2. Menghitung pajak pertambahan nilai pada PT. Prima Tata Kargo berdasarkan ketentuan tarif dasar pajak sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. PT. Prima Tata Kargo telah memenuhi kewajiban memungut, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak terkait PPN.
3. PPN pada PT. Prima Tata Kargo sudah dilakukan dan dilaporkan berdasarkan peraturan perpajakan pada setiap periode, juga melalui aplikasi perpajakan sesuai ketentuannya.
4. Hubungan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan pendapatan pada PT. Prima Tata Kargo menggunakan metode akrual, pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi hingga pendapatan diakui sesuai yang sebenarnya serta pengakuan, pembayaran, dan pelaporan perpajakannya telah benar saat periode bulan tersebut. Semakin tinggi pendapatan diakui oleh pemberi jasa, maka semakin tinggi PPN yang terutang dan dilaporkan oleh PT. Prima Tata Kargo.

Saran

Hasil penelitian yang diperoleh dari data dan merujuk pada teori-teori yang ada, keseluruhan PT. Prima Tata Kargo sudah terbilang baik. Selanjutnya, saran dari peneliti yang diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat dimasa mendatang untuk kelangsungan PT. Prima Tata Kargo adalah :

1. Pelaporan PPN pada PT. Prima Tata Kargo supaya dilaporkan lebih awal agar tidak diberikan sanksi keterlambatan oleh pihak perpajakan.
2. Untuk pembayaran PPN 11% atau pungutan pajak lain harus di bayarkan atau di setor kan sesuai aturan pajak dan tarif yang sudah di tetapkan.
3. Dalam sistem pembukuan pendapatan maupun pengeluaran kas harus menggunakan sistem keuangan atau sistem akuntansi secara digital dan tidak manual yang sudah du terapkan sebelumnya.
4. PT. Prima Tata Kargo agar dapat mempertahankan kinerjanya dan dapat lebih memperbaiki kinerja khususnya dalam hal pelaporan keuangan perusahaan sehingga lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Greuning, Hennie Van. et al. 2013. *International financial reporting standards : sebuah panduan praktis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harnanto. 2019. *Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed.)*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Ahmad. 2017. Analisis Keterkaitan Pengakuan Pendapatan Dalam Accrual Method Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya. <https://eprints.perbanas.ac.id/4265/1/artikelilmiah.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Martani, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi 2 Buku 1 2016, Salemba Empat, Jakarta.
- Pohan, Chairil. A. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratihah dan Rahma, Ariana. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2371>
- Rahman, Abdul. 2018. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada PT. Askrindo Cabang Makassar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/4824.pdf>
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratihah dan Rahma, Ariana. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2371>
- Rahman, Abdul. 2018. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada PT. Askrindo Cabang Makassar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/4824.pdf>
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sochib. 2018. Pengantar Akuntansi 1 (pertama). Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, Theodorus M. 2011. Berpikir Kritis Dalam Auditing. Salemba Empat, Jakarta.

Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.